

**KERJA SAMA MEKSIKO-AMERIKA SERIKAT DALAM MENGHADAPI
KARTEL NARKOBA 2021-2023**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu
Hubungan Internasional*

Oleh :

Abdullah Dzakwan Djuanda

E061191091

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KERJASAMA AMERIKA SERIKAT – MEKSIKO DALAM
MENGHADAPI KARTEL NARKOBA 2021-2023

N A M A : ABDULLAH DZAKWAN DJUANDA

N I M : E061191091

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 16 Agustus 2024



Pembimbing I,

Dr. H. Adi Suryadi B. MA
NIP. 196302171992021001

Pembimbing II,

Agussalim, S.IP, MIRAP
NIP. 197608182005011003

Mengesahkan :

Pt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,

Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KERJASAMA AMERIKA SERIKAT – MEKSIKO DALAM MENGHADAPI KARTEL NARKOBA 2021-2023

N A M A : ABDULLAH DZAKWAN DJUANDA

N I M : E061191091

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 7 Agustus 2024.



Ketua : Dr. H. Adi Suryadi B, MA

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.SI, MIR

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D.

2. Agussalim, S.IP, MIRAP

3. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ABDULLAH DZAKWAN DJUANDA

NIM : E061191091

PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

JENJANG : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

KERJASAMA AMERIKA SERIKAT – MEKSIKO DALAM MENGHADAPI KARTEL NARKOBA 2021-2023

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Agustus 2024

Yang Menyatakan



ABDULLAH DZAKWAN DJUANDA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kerjasama Amerika Serikat-Meksiko Dalam Menghadapi Kartel Narkoba 2021-2023” dengan baik dan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantar kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan bentuk kontribusi penulis dalam bidang keilmuan terkait dan bertujuan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah kekerasan berbasis gender. Mengingat keterbatasan penulis serta hambatan-hambatan yang dialami oleh penulis selama proses penyusunan, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan umpan balik berupa kritik dan saran para pembaca sebagai bahan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi, penulis juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada

1. Orang tua penulis, Bapak Ir. Djuanda Duli dan Bunda Fajar S. Djuanda yang tak henti senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungannya kepada penulis. Terima kasih atas dukungan, pengorbanan, kasih sayang, dan perhatian yang diberikan kepada penulis. Tak hentinya penulis bersyukur atas karunia orang tua hebat yang selalu mendampingi penulis selama proses yang dihadapi, suka dan duka, serta tempat penulis berkeluh kesah. Semoga dengan selesainya satu tugas penulis ini dapat membuat kalian bangga. Meski penulis tau bahwa tidak satupun setimpal dengan pengorbanan kalian.

2. Adik penulis, Ahmad Dzidan Djuanda, Fayyadh Djuanda, dan Fuad Hanif Djuanda, yang senantiasa menjadi pengingat bagi penulis, terimakasih telah memberikan canda tawa dan semangat untuk penulis. Semoga penulis dapat memberikan yang terbaik untuk kalian.
3. Teman baik penulis, Coach Mufly, Don Daffa, Mr Ichsan, Berek, Ipa Hudaipa, Kak Venike dan teman terbaik di segala kondisi, Nur Rizky Pratiwi. Terimakasih telah memberikan motivasi dan tuntutan untuk penulis. Semoga kita dapat menjaga hangatnya hubungan dan mencapai cita masing-masing.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta jajarannya, Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si., Prof. Dr. Hasniati, S.sos M.Si., Dr Moehamad Iqbal Sultan M.Si., Prof. Dr. Suparman, M.Si. Muliaty Badaruddin, S.sos, M.Si.
5. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Prof Darwis, MA., Ph.D
6. Seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Patrice Lumumba, MA., Bapak (Alm) Drs. Aspiannor Masrie, M.Si., Bapak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Bapak Aswin Baharuddin, S.IP., MA., Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP., MA., Ibu Atikah Puspita Marzaman, S.IP., MA., Ibu Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D., dan Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si. Agussalim, S.IP, MIRAP., Dr. H Adi Suryadi B, MA. Terimakasih atas ilmu dan didikannya selama studi penulis di prodi Ilmu Hubungan Internasional.
7. Dosen penasihat akademik penulis Bapak Patrice Lumumba, MA. Terimakasih atas bimbingan dan perhatiannya kepada penulis selama melaksanakan studi.
8. Dosen pembimbing Dr. H Adi Suryadi B, MA, selaku pembimbing I dan Agussalim, S.IP, MIRAP., selaku pembimbing II. Terimakasih atas bimbingan, arahan, masukan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan baik

9. Pegawai dan staff akademik, Kak Rahmah, Pak Ridho dan Kak Sani. Terimakasih atas bantuan administrasi selama studi penulis.
10. Teman dekat penulis, Franz, Zammil, Assi, Kautsar, Cahyar, Ashary, Bung Esza, Owi Kopter, Aynul, Cham dan Ifan Pawe terimakasih atas dukungan, kasih sayang, perhatian dan waktu yang diberikan kepada penulis. Terimakasih telah menjadi keluarga kedua penulis, senantiasa menemani penulis dalam suka dan duka. Memberikan dorongan moral untuk penulis dan senantiasa mendampingi penulis.
11. Bassto (Boges, Aan, Abdi, Ombak, Pandu, Nurbakti, Pak Uta, Om H, Farel, Indra, Maswir, dan Fauzan Azim) Terimakasih telah memberikan canda tawa dan dukungan moral kepada penulis.
12. Posko 11 KKN 110 Bantaeng (Zammil, Arul, Sakty, Armin, Adel, Ana, Wahyu, Shanti, Pipi, Kak Pitty, dan Kak Kifly) Terima kasih atas kenangan dan pelajaran selama masa pengabdian di Bantaeng.
13. Teman-temanku Uga, Sesol, Adetry, Kak Ica, Kak Wizz, Kak Agung, Grey, Pardick, Naufal, nado, Ical dan Cacam. Terimakasih telah menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi ini, meskipun tidak berkontribusi apa-apa selain kehadiran. Semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat.
14. Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) Kak Wais, Kak Gun, Kak Tatu, Kak Dian, Kak Dito, Kak Nita, Kak Novi, Kak Tyas, Kak Rizky, Kak Azhar, Kak Ikrana, Kak Ilmi, Kak Ainil, Kak Ryan, Kak Asrul, Kak Yusril Partang, Kak Ucup, Alfreda, Alifa, Odie, Alya, Aliyah, Balqies, Ius, Oni, Uga, Eca, Ainul, Anes, Chantika, Leo, Reul, Sabina, Harun, Iqbal, Chusnul, Azis, Pute, Naurah, Aula, Amirah, Wiwi, Auni dan semuanya yang tidak sempat penulis sebutkan. Terimakasih telah menjadi rumah dan tempat belajar untuk penulis.
15. Teman-teman yang kebersamai BEM KEMA FISIP UNHAS Periode

2022-2023, Laqul, Della, Oci, Salay, Kak Mamat, Dewang, Mas Arifin, Ibnu, Mamang, Alfi, Alif, Hafiqi, Irfan, Zahra, Rio Antes, Suneo, dan Pannur.

Peran kalian tidak akan saya lupakan.

16. Penghuni Damai, (Kak Agung, Kak Ardi, Kak Yasin, dan Eca) Terimakasih atas dukungan materil berupa kamar kepada penulis. Semoga dilimpahkan rezeki dan kesehatan.
17. Terima kasih dan apresiasi untuk laki-laki yang sampai saat ini masih berjuang dan berharap hal-hal baik terus menyertainya dengan segala rintangan yang dihadapi. Terimakasih sudah kuat bertahan dan mau belajar menerima, belajar hal-hal baru, belajar bahwa manusia hanya bisa berencana dan Allah SWT menentukan. Semoga hal-hal baik dan ridho Allah SWT selalu menyertainya, Abdullah Dzakwan Djuanda.

ABSTRAK

Abdullah Dzakwan Djuanda, 2019. E061191091. “KERJASAMA MEKSIKO-AMERIKA SERIKAT DALAM MENGHADAPI KARTEL NARKOBA 2021-2023”. Pembimbing I: DR. Adi Suryadi Culla. Pembimbing II: Agussalim, S. IP, MIRAP. Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak aktivitas kartel narkoba di Meksiko terhadap Kerjasama Amerika Serikat dengan Meksiko. Berdasar pada tujuan tersebut, penelitian ini berfokus pada dinamika kartel narkoba dan dinamika Kerjasama Amerika Serikat dengan Meksiko dalam bidang keamanan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2023, secara spesifik merujuk pada Bicentennial Framework. Dengan mengadopsi Pendekatan *strategic relational* dan Teori *organized criminal groups*, penelitian ini berusaha mengidentifikasi pengaruh secara timbal balik dari dinamika kartel narkoba dengan dinamika kerjasama. Kedua dinamika tersebut tentu dipengaruhi oleh strategi dan taktik aktor tertentu, kepentingan aktor tertentu, kondisi sosial-politik, dan kondisi geografi politik yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode *process tracing*. Dengan menggunakan *process tracing*, penelitian ini berusaha mengeksplorasi berbagai fenomena yang berkaitan dengan dinamika kartel narkoba dan dinamika Kerjasama Amerika Serikat dengan Meksiko. Adapun hasil penelitian menunjukkan; (1) Dinamika antara Kartel Narkoba dengan Negara sebagai representasi interaksi aktor tertentu, dalam hal ini Amerika Serikat dan Meksiko berdampak pada perubahan strategi dan taktik yang digunakan oleh masing-masing pemerintah, baik pada ranah internasional (melalui kerjasama dalam bidang pertahanan) maupun pada ranah domestik (melalui kolaborasi antar institusi dan program tertentu), (2) Tantangan kerjasama Amerika Serikat dengan Meksiko dalam bidang keamanan dipengaruhi oleh keterlibatan kelompok pemodal yang bergerak di sektor farmasi dan persenjataan dalam mengarahkan kerjasama kedua negara.

Kata kunci: kartel narkoba, bicentennial framework, dinamika aktor, *state power*, Meksiko, Amerika Serikat

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of drug cartel activities in Mexico on the United States Cooperation with Mexico. Based on this objective, this study focuses on the dynamics of drug cartels and the dynamics of the United States cooperation with Mexico in the field of security in the period 2021 to 2023, specifically referring to the Bicentennial Framework. By adopting the strategic relational approach and the theory of organized criminal groups, this research seeks to identify the mutual influence of drug cartel dynamics and cooperation dynamics. Both dynamics are certainly influenced by the strategies and tactics of certain actors, the interests of certain actors, socio-political conditions, and political geography conditions that occur in a certain period of time. The method used in this research is the process tracing method. By using process tracing, this research seeks to explore various phenomena related to the dynamics of drug cartels and the dynamics of US-Mexico cooperation. The results of the study show; (1) The dynamics between Drug Cartels and the State as a representation of the interaction of certain actors, in this case the United States and Mexico, have an impact on changes in strategies and tactics used by each government, both in the international realm (through cooperation in the field of defense) and in the domestic realm (through collaboration between institutions and certain programs), (2) The challenges of cooperation between the United States and Mexico in the field of security are influenced by the involvement of groups of capitalist engaged in the pharmaceutical and weapons sectors in directing the cooperation of the two countries.

Keywords : *drug cartels, Bicentennial Framework, dynamics of actors, state power, Mexico, United States*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
ABSTRACT	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Kerangka Konsep	17
1. Organized Criminal Groups	19
2. Strategic Relational Approach (SRA).....	21
E. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Metode Pengumpulan dan Analisis Data	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Organized Criminal Groups	26
B. Strategic Relational Approach	32
C. Penelitian Terdahulu	37
BAB III GAMBARAN UMUM	45
A. Dinamika Hubungan Bilateral Amerika Serikat-Meksiko	45
B. Dinamika Kerjasama Amerika Serikat-Meksiko dalam Bidang Keamanan.....	53
1. War On Drugs	53
2. Merida Initiative.....	55

3. Bicentennial Framework	58
C. Dinamika Kartel Narkoba di Meksiko	60
BAB IV PEMBAHASAN	70
A. Dampak Perang Kartel Narkoba terhadap Hubungan Bilateral Meksiko dengan Amerika Serikat dalam Bidang Keamanan	70
1. Implementasi Bicentennial Framework di Meksiko	73
2. Implementasi Bicentennial Framework di Amerika Serikat	75
B. Peluang dan Tantangan Kerjasama Amerika Serikat dengan Meksiko dalam Bidang Keamanan	79
1. Peran Pemodal dalam Kerjasama Dalam Hubungan Bilateral Amerika Serikat dan Meksiko	80
2. Transformasi Kartel Narkoba Pasca Bicentennial Framework	86
BAB V	92
PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pilar Kerjasama Merida Initiative 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Kerangka Konsep	17
Gambar 2 Visualisasi Gray Zone of Criminality	29
Gambar 3 Peta Sebaran Wilayah Kartel Narkoba di Meksiko.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang kartel telah menjadi fenomena di Meksiko setidaknya dalam dua dekade terakhir. Perang kartel merujuk pada fenomena yang terjadi antara kartel (gembong narkoba) dengan kartel maupun kartel dengan Pemerintah. Perang kartel seringkali disebabkan oleh dua faktor, yaitu intervensi pemerintah dalam rangka menekan peredaran narkoba dan perebutan wilayah kekuasaan yang terjadi antar kartel (Voeten, 2020).

Dalam kurun waktu 2 dekade terakhir, perang kartel di Meksiko telah melibatkan sejumlah kartel besar yang terdiri dari kartel *incumbent* dan kartel *challenger*, yang beroperasi hampir di seluruh wilayah Meksiko. Adapun kartel yang dimaksud antara lain, *Gulf Cartel*, *Sinaloa*, *Tijuana*, *Juarez* tergabung dalam kategori kartel *incumbent*—kartel yang telah beroperasi dalam kurun waktu 30 tahun lebih dan menguasai sebagian besar rute perdagangan narkoba domestik dan internasional. Sementara itu, *Bertran-Lyefa Cartel*, *Familia* dan *Los Etas Cartel* merupakan kartel *challenger*—kartel yang berusaha masuk ke dalam pasar narkoba di Meksiko (Battiston, 2022).

Kesemua kartel tadi memiliki latar belakang sejarah pembentukannya masing-masing. Namun, pembentukan kartel pada umumnya disebabkan oleh motif akumulasi profit dan perpecahan di dalam organisasi. Sebagai contoh, *Los Setas Cartel* pada mulanya adalah divisi pertahanan dari *Gulf cartel* yang kemudian mendirikan kelompok independen karena telah mampu mengorganisir aktivitas penyelundupan narkoba (Alan, 2022). Contoh lainnya yakni

pembentukan *Cártel Jalisco Nueva Generación* (CNJG). Sepak terjang CNJG bermula ketika Kartel Sinaloa membutuhkan ‘kelompok pemburu’ untuk mengamankan gerak-gerak kartel ketika menghadapi situasi konfrontatif dengan Kartel Gulf. Posisi tadi kemudian dimanfaatkan oleh beberapa aktor untuk membentuk CNJG.

Konsep *Drug Trafficking Organisations* (DTO) merujuk pada kelompok terorganisir yang melakukan aktivitas perdagangan *contraband* dan tindakan kriminal yang memberikan rasa tidak aman bagi masyarakat. DTO melakukan aktivitas perdagangan melalui *dunia abu-abu* yang jarang diketahui oleh masyarakat umum (Guillermo, 2020). Selain perdagangan, DTO juga melakukan suap kepada pemerintah untuk melancarkan operasi. Selain itu, DTO melakukan kekerasan guna mendisiplinkan pekerja (dan anggota kartel) dan membatasi gerak kartel rival (Beittel, 2015).

Pengertian lainnya mengenai DTO juga dijelaskan oleh Sandra Jansson dan Paul Rexton. Adapun pengertiannya sebagai berikut:

a DTO is (1) a non-state actor, an organised crime group which can be structured more hierarchically or cell-like. (2) They always pursue illicit business, mostly in drugs, but also other illicit activities such as extortion or kidnapping. (3) The purpose of their operations is financial gain. (4) They commonly use violence and (5) aim to control territory for business operating purposes and sometimes collaborate with the community in this process. (6) Bribing or threatening state officials is very common. (Jansson, 2021)

Sementara itu Paul Rexton membatasi ciri-ciri DTO sebagai berikut:

They are 1) involved in illegal activities and frequently need the same supplies; 2) exploit excessive violence and the threat of

violence; 3) commit kidnappings, assassinations and extortion; 4) act in secrecy; 5) challenge the state and the laws (unless they are state funded); 6) have back up leaders and foot soldiers; 7) are exceedingly adaptable, open to innovations, and are flexible; 8) threaten global security; 9) quitting the group can result in deadly consequences for former members. (Rexton, 2011)

Berdasar pada dua pengertian DTO yang telah dijabarkan di muka, secara umum DTO memiliki karakteristik yang membedakan kelompok tersebut dari organisasi kriminal lainnya. Mengutip Sandra Jansson dan Paul Rexton karakteristik yang dimaksud seperti, aktor non-negara yang strukturnya berbentuk sel maupun hirarkis, bergerak di industri narkoba, berfokus pada keuntungan (profit), kerap menggunakan kekerasan, mengincar kontrol terhadap suatu wilayah guna menjalankan bisnis, kerap melakukan suap dan ancaman kepada pejabat negara (Jansson, 2021). Karakteristik DTO menurut Paul Rexton seperti, mengancam keamanan global, bergerak secara rahasia, mampu beradaptasi dengan kondisi terkini, memiliki anggota cadangan (Rexton, 2011).

Di Meksiko sendiri terdapat tiga versi penyebab masuknya narkotika di Meksiko. Pelacakan historis ini menjadi penting karena komoditas dagang utama DTO adalah narkotika.

Pertama, asal-usul hadirnya opium di wilayah Meksiko disebabkan oleh migrasi masyarakat Cina (umumnya untuk menjadi pekerja) ke wilayah Meksiko dan Amerika Serikat pada abad 19—menurut catatan sejarah, pada abad 19 *British Empire* dan Dinasti Qing pernah terlibat perang dagang, hari ini kita mengenalnya sebagai peristiwa *war on opium*. Migrasi tadi memungkinkan para imigran membawa berbagai barang seperti, peralatan kerja, obat-obatan, termasuk pula

bahan dasar kokain dan opium (Voeten, 2020). Selain itu, peristiwa migrasi juga mendorong hadirnya pemukiman baru di perbatasan Meksiko, wilayah perbatasan pada saat itu menjadi tempat yang dianggap sempurna karena belum memiliki regulasi yang ketat.

Kedua, secara letak geografis negara bagian Sinaloa yang dekat dengan perbatasan laut dan darat menjadikan negara bagian ini sebagai jalur keluar-masuk berbagai barang (Voeten, 2020). Sepanjang masa revolusi Meksiko negara bagian Sinaloa juga berfungsi sebagai rute penyelundupan senjata dan perak yang dimana aktivitas tersebut membentuk kebiasaan masyarakat untuk tidak percaya kepada otoritas dan pewajaran terhadap keluar-masuknya barang legal maupun ilegal (Voeten, 2020). Kondisi ini kemudian dimanfaatkan baik oleh penduduk asli yang menjadi *gangster* dan imigran pekerja yang berasal dari Cina untuk menyelundupkan berbagai macam narkotika seperti, *meth*, marijuana, kokain, dan heroin.

Ketiga, karakter masyarakat Sinaloa dianggap berwatak licik. Sebagai contoh, dalam masyarakat Sinaloa dikenal ungkapan “El que no transa, no avanza” yang jika diterjemahkan berarti ‘siapa yang tidak menipu tidak akan kemana-mana’ (Castaneda, 2011). Menurut Castaneda, watak licik masyarakat Sinaloa berpengaruh pada kecenderungan mereka untuk mengabaikan hukum dan bersikap licik antara satu dengan yang lainnya sehingga penegakan hukum sulit dilakukan. Dampak dari watak licik masyarakat (yang digeneralisir) yakni rentan terjadi korupsi dan timbul karakter kepemimpinan yang patrilineal (Voeten, 2020). Kondisi ini menjadikan Sinaloa sebagai wilayah yang lekat dengan

aktivitas penyelundupan barang-barang *contrabands*. Ketiga faktor sosio-historis yang telah dipaparkan memungkinkan DTO tumbuh subur di wilayah Meksiko terutamanya pada negara bagian Sinaloa.

Tumbuh suburnya DTO di Meksiko memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk tindakan kriminal lainnya (selain perdagangan narkoba). Pencurian minyak merupakan salah satunya. Secara historis, pencurian minyak merupakan aktivitas yang telah berlangsung sebelum hadirnya kartel (Vivoda, 2023). Para *huachicoleros*—sebutan masyarakat kepada pelaku pencurian minyak—direkrut untuk bekerja pada kartel guna menambah sumber pendapatan kartel. Pada bagian selanjutnya bakal memuat daftar DTO yang memanfaatkan sumber daya minyak sebagai salah satu upaya meraup keuntungan.

Kartel pertama yang memanfaatkan sumber daya minyak, yakni *Cártel Jalisco Nueva Generación* (CNJG). Terbentuk pada tahun 2010 setelah terjadinya perpecahan di dalam Kartel Milenio (anak perusahaan Kartel Sinaloa). CNJG saat ini dipimpin oleh Nemesio Oseguera Cervantes alias *El-Mencho* (Jansson, 2021). CNJG juga terlibat dalam perebutan sumber daya alam, salah satunya minyak (baik mentah maupun produk jadi). Motif utama keterlibatan CNJG dalam pengelolaan minyak yakni untuk ekspansi bisnis (Jansson, 2021). CNJG merupakan kartel terbesar kedua yang meraup keuntungan dari komoditas minyak (setelah LZ). CNJG menguasai 21% minyak mentah dari total kehilangan yang dilaporkan PEMEX dan pernah meraup keuntungan sebesar 212 Juta USD (Ralby, 2017). Untuk mencapai posisi tersebut, CNJG melakukan dua langkah, yaitu suap kepada aparat negara dan pembuatan pipa palsu.

Kartel kedua yang turut memanfaatkan sumber daya minyak sebagai sumber keuntungan, yakni Los Zetas (LZ). Menurut Ian Ralby, LZ merupakan kartel dengan pencurian minyak terbesar atau menguasai 30% minyak ilegal yang dilaporkan PEMEX pada tahun 2017 (Ralby, 2017). Dalam kurun waktu 2005-2011 LZ juga membangun kerja sama dengan badan usaha yang beroperasi di negara bagian Chihuahua (secara spesifik merujuk pada daerah Matamoros, Tamaulipas, Piedras Negras, dan Coahuila). Kerjasama LZ-AMHSA (Perusahaan baja swasta di Meksiko) terjadi karena penemuan PEMEX mengenai potensi batu bara dan minyak bumi di wilayah Tamaulipas dan Coahuila dan, intensi LZ untuk menguasai rute perdagangan narkoba dan kontrol wilayah di Chihuahua (Cabrera, 2017). Kerjasama LZ-AMHSA bukan tanpa akibat, pedagang kecil dan pemilik lahan menjadi korban kekerasan karena minimnya keterlibatan pemerintah di lapangan. LZ memang jarang menggunakan kekuatan untuk berkonflik langsung dengan pemerintah, alih-alih LZ mengerahkan kekuatan untuk menebar teror dan mengancam masyarakat (Jansson, 2021).

Kartel ketiga yakni, Cabaleros Templarios (CT) juga terlibat dalam pemanfaatan minyak secara ilegal. Seperti kebanyakan DTO, CT juga melirik sumber daya minyak guna melakukan ekspansi bisnis meskipun dengan jumlah yang tidak terlalu banyak (jika dibandingkan dengan Los Zetas). Hasil pencurian minyak oleh CT kemudian dijual dengan harga lebih murah ke pasar (CNJG dan LZ juga melakukan hal serupa). Menurut Ralby, tersedianya minyak murah yang dijual oleh sejumlah kartel berpengaruh terhadap monopoli PEMEX sebagai badan usaha negara di sektor migas (Ralby, 2017).

Keberadaan *Drug Trafficker Organisation* (DTO) di Meksiko telah bermula sejak dekade 1980an. Perkembangan DTO di Meksiko bermula ketika kokain yang berasal dari Kolombia membutuhkan organisasi kriminal sebagai pemasok ke wilayah-wilayah lainnya termasuk Amerika Serikat. Sebagai pemasok barang ilegal (*contraband*), DTO dapat melancarkan aksinya secara mulus karena menyuap pihak keamanan dan pertahanan di Meksiko. Aktivitas tersebut berlanjut hingga dekade 1990-an. Pada dekade 1990-an DTO di Meksiko telah bertransformasi menjadi produsen sekaligus distributor narkotika bagi pasar internasional (Dudley, 2012). Sebagai konsekuensi dari meluasnya peran serta pasokan, DTO terus meningkatkan kekuatannya agar mampu bertahan dari intervensi pemerintah Meksiko. Pada posisi ini kartel yang ada di Meksiko melancarkan perang baik sesama kartel ataupun kartel dengan pemerintah.

Meksiko (merujuk pada letak geografis) menjadi arena perang kartel sejak 1990-an. Hal ini bermula ketika terjadi perubahan sistem kepartaian yang semula berbentuk *single party* menjadi *multiparty*. Desentralisasi kekuasaan PRI selama 71 tahun di Meksiko membuka kesempatan bagi aktor-aktor politik pendatang baru pada konstelasi politik dalam negeri Meksiko. Perubahan tersebut memudahkan kartel dalam membangun relasi dengan anggota pemerintahan. Pada saat yang bersamaan, kartel dengan leluasa membentuk divisi pertahanannya sendiri (Guillermo, 2020).

Pada tahun 2008 peran pemerintah Meksiko dalam menghalau operasi kartel telah memasuki babak baru. Pemerintah Meksiko (saat itu dipimpin oleh Presiden Felipe Calderon) menjalin kerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat (saat

itu dipimpin oleh Presiden Bush) yang membuahkan *Merrida Initiative*. Kerja sama tersebut bertujuan mengadakan peralatan seperti, pesawat, amunisi, *drone*, serta sumber daya manusia yang bakal menekan kartel-kartel narkoba yang beroperasi di Meksiko. Tujuan lainnya yaitu, menghancurkan kekuatan dan menghukum Kartel Narkoba, memperkuat perbatasan (darat dan udara), meningkatkan kontrol maritim, meningkatkan kapasitas sistem peradilan di berbagai wilayah kartel, menghambat aktivitas Kartel dan mengurangi permintaan narkoba terutama di AS. Di sisi lainnya, kerja sama ini dilatar belakangi oleh tingginya konsumsi narkoba jenis *meth*, marijuana, kokain dan heroin di Amerika Serikat (Group, 2022).

Pada masa pemerintahan Donald Trump cakupan *Merrida Initiative* mengalami perluasan. Perubahan cakupan kerja sama ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu *Merrida Initiative* dinilai kurang ampuh sebagai strategi dalam menghadapi gerak-gerak kartel (Navarro, 2023), dan Pandemi COVID-19 yang mendorong pihak Amerika Serikat mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, salah satunya kepada Meksiko (Graham, 2021).

Pada tahun 2021, kerja sama Meksiko-Amerika Serikat dalam memberantas kartel narkoba menemui kebuntuan. *Merida Initiative* dianggap gagal oleh berbagai kalangan seperti, politisi, pengamat kebijakan, bahkan Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO). Presiden tersebut menganggap *Merida Initiative* hanya menguras anggaran pertahanan dan keamanan Meksiko dan Amerika Serikat, serta menyebabkan banyak korban sipil maupun aparat negara. Pada tahun ini terbentuk forum *High Level Security*

Dialogue antara Meksiko dengan Amerika Serikat, sebagai bentuk tindak lanjut dari gagalnya Program Merida Initiative (State, 2022).

Forum *High Level Security Dialogue* juga menjadi awal dari terbentuknya Bicentennial Framework. Program Bicentennial Framework memiliki tiga tujuan utama, yaitu *Protect Our People*—berfokus pada keamanan masyarakat sipil di kedua negara, *Prevent Transborder Crime*—berfokus pada kriminalitas yang mengandalkan penyelundupan seperti, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia, penyelundupan hewan liar dan narkoba, *Pursue Criminal Network*—berfokus pada mencegah kartel atau DTO untuk meraup keuntungan (State, 2022). Kesemua poin tadi akan dijabarkan lebih lanjut di bagian pembahasan

Penggunaan narkoba baik di US maupun Meksiko terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 2002 hingga 2008 pengguna narkoba jenis kokain dan marijuana di Meksiko meningkat dari 2,5 Juta orang menjadi 3,5 juta orang yang didominasi oleh masyarakat berusia 13-25 tahun atau 43% dari total pengguna (Narconon, 2010). Sementara itu di US, pengguna narkoba jenis Marijuana, Kokain, dan LSD mencapai 37.309 orang dan sebagian besar telah mengonsumsi narkoba sejak berusia 12 tahun (NCDAS, 2020).

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pembahasan pada dampak perang kartel terhadap kerjasama Meksiko-AS di bidang ekonomi karena keberadaan kartel berpengaruh terhadap dinamika hubungan bilateral Meksiko-AS. Sekilas, hubungan Meksiko-AS terpengaruh oleh kondisi domestik (dalam arti politik)

masing-masing negara (aktor internasional), begitupun sebaliknya kondisi domestik masing-masing negara dipengaruhi oleh dinamika hubungan bilateral Meksiko-AS di bidang ekonomi.

Peneliti membatasi pembahasan pada fenomena perang kartel sebagai kondisi domestik di Meksiko yang memengaruhi penggunaan *state power* Meksiko dan AS. Selain itu, peneliti mengerucutkan pembahasan pada kerja sama Meksiko-AS di bidang keamanan karena porsi kerja sama kedua negara di bidang keamanan karena masing-masing pemerintah memiliki kepentingan dalam bidang tersebut. Berikut rumusan penelitian yang diangkat oleh penulis:

1. Bagaimana dampak Perang Kartel di Meksiko terhadap hubungan Amerika Serikat-Meksiko di bidang keamanan dari tahun 2021 hingga tahun 2023?
2. Bagaimana peluang dan tantangan kerjasama Amerika Serikat-Meksiko di bidang keamanan setelah menghadapi kartel narkoba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

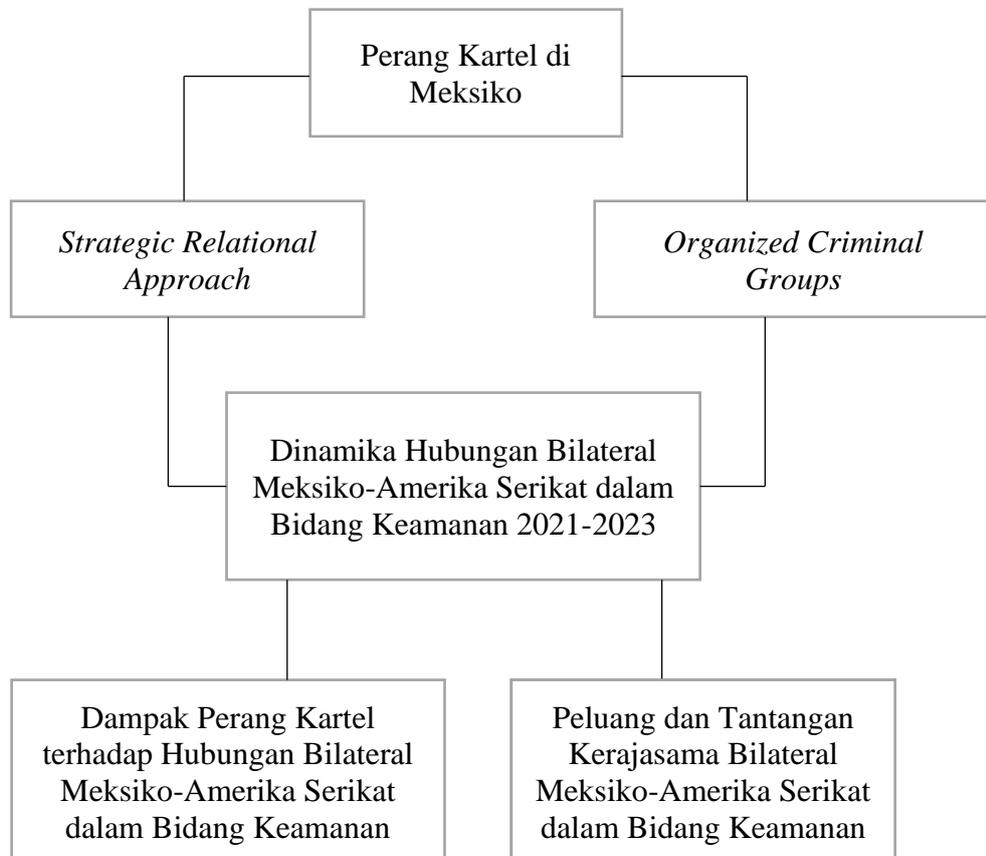
Berdasar pada rumusan masalah yang telah disusun di bagian sebelumnya, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perang kartel (*cartel wars*) terhadap kerjasama ekonomi Meksiko-Amerika Serikat.

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman mengenai faktor-faktor aktivitas kartel yang mempengaruhi kerja sama Meksiko-AS di bidang ekonomi.

- b. Bagi akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional yang membahas terkait sejumlah dampak perang kartel dan hubungan kerja sama Meksiko-AS.
- c. Bagi praktisi, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan yang memiliki topik serupa dengan penelitian ini.

D. Kerangka Konsep



Gambar 1 Skema Kerangka Konsep

Berdasar pada bagan skema kerangka konseptual di atas, maka peneliti bakal menempatkan fenomena perang kartel di Meksiko sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti memanfaatkan pendekatan *Strategic Relational* yang dipopulerkan oleh Bob Jessop guna menganalisa penggunaan *state power* Meksiko baik pada ranah domestik maupun pada ranah internasional. Penggunaan *Strategic Relational Approach* bakal berfokus pada berbagai relasi sosial yang membentuk perimbangan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan oleh aktor-aktor yang dianggap berpengaruh di kedua negara. Pemahaman ini penting untuk mengetahui respon (secara materil maupun diskursif) kedua negara terhadap aktivitas kartel.

Selain itu, peneliti juga memanfaatkan teori *Organized Criminal Groups* (OCGs). Lebih spesifik merujuk pada pendekatan yang dipopulerkan oleh Guillermo Trejo lewat bukunya, *Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico*. Penggunaan teori *Organised Criminal Groups* bakal berfokus pada dinamika antara kartel dan negara, termasuk pula isu-isu yang terkait langsung dengan aktivitas kartel yang berada dalam kerangka hubungan bilateral kedua negara. Pemahaman ini penting untuk memahami sejauh apa aktivitas kartel memengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Penjabaran secara spesifik mengenai teori *Organized Criminal Groups* akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

1. Organized Criminal Groups

Menurut Letizia Paoli, *organized criminal groups* merupakan kelompok yang terdiri dari beberapa individu yang melakukan tindakan kriminal yang berfokus pada penyediaan barang dan jasa ilegal. Selain itu, *organized criminal groups* hanya dapat mengkonsolidasikan kekuatan dalam konteks lemahnya kemampuan negara untuk mengadili kelompok yang dimaksud (Paoli, 2016).

Pengertian lainnya disampaikan oleh Guillermo Trejo dalam bukunya, *Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico*, *Organised Criminal Groups* (OCGs) merupakan organisasi yang berfokus pada profit, yang beroperasi di pasar ilegal dengan bantuan aparat dan pejabat negara secara informal (Guillermo, 2020). Teori ini berdasar pada dua asumsi utama. Pertama, OCGs hanya bisa menjalankan aktivitasnya jika mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi dalam negara. Kedua, tidak semua pejabat negara melakukan penegakan hukum terhadap kriminalitas, terdapat pula pejabat negara yang bahkan menjadi bagian dari OCGs (Guillermo, 2020).

Guillermo juga menjabarkan bahwa OCGs berbeda dengan *criminal groups*. Aktivitas yang dilakukan OCGs seperti, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata dan manusia, bahkan kekerasan, membutuhkan informasi dan sumber daya yang mampu digerakkan oleh aktor dan kekuasaan tertentu. Sementara itu, *criminal groups* menganggap negara sebagai musuh, dan cenderung membangun hubungan *zero sum game* dengan aktor politik tertentu (Guillermo, 2020). Relasi antara OCGs dengan negara hanya dapat terjadi di dalam *gray zone*. Adapun pengertian *Gray zone*, yaitu ekosistem yang di dalamnya terdapat paksaan, korupsi,

dan kriminalitas yang memungkinkan interaksi antara pejabat negara dan kelompok bisnis untuk melakukan kejahatan terorganisir (Guillermo, 2020).

Pada konteks Meksiko, *gray zone* dapat terbentuk karena perubahan di dalam sistem politik domestik Meksiko membuka kemungkinan adanya aktor atau kekuatan baru, yang di sisi lainnya turut membangun kerja sama dengan kartel (*criminal groups*) (Guillermo, 2020). Meskipun motif awal kartel adalah mendapatkan keuntungan, tidak dapat dipungkiri aktivitas yang mereka jalankan membutuhkan perlindungan pejabat pemerintah atau pihak berwenang. Selain perlindungan, OCGs juga membutuhkan informasi dan berbagai layanan ‘informal’ lainnya seperti, sumber daya dan akses institusi tertentu.

Untuk menjalankan aktivitas bisnis, OCGs berfokus pada kontrol terhadap suatu wilayah. Upaya mendapatkan kontrol terhadap suatu wilayah dilakukan dengan banyak cara seperti, tindakan teror, penyandaraan, dan perang. Guillermo menjelaskan tindakan OCGs, yaitu:

As turf wars for the control of drug trafficking routes become more intense, cartels are likely to expand beyond the drug business and venture into the extraction of human wealth, public wealth, and natural resource wealth in order to remain competitive. To control local populations, governments, and territories, cartels and their criminal associates develop subnational criminal governance regimes through the use of force (Guillermo, 2020).

OCGs menggunakan jaringan kriminal seperti, organisasi kriminal lainnya dan pemerintah korup untuk mengontrol masyarakat (populasi), pemerintah, dan wilayah tertentu. Dalam situasi perebutan wilayah, OCGs mampu bertindak melampaui perdagangan narkoba. OCGs (kartel narkoba) juga merebut akses

terhadap sumber daya manusia, sumber daya publik (institusi publik), dan sumber daya alam (Guillermo, 2020).

Teori *organized criminal groups* berfokus pada tiga titik analisis utama. Pertama, relasi DTO dengan negara yang dikonseptualisasi menjadi *Gray zone of Criminality*. Kedua, transformasi aktivitas kartel yang pada dasarnya adalah kelompok bisnis. Ketiga, dampak yang dihasilkan oleh relasi kartel-negara dan transformasi kartel (Guillermo, 2020). Ketiga titik analisis ini mampu menjelaskan mengapa aktivitas kartel menjadi fokus utama dari Bicentennial Framework—kerja sama Amerika Serikat dan Meksiko.

2. Strategic Relational Approach (SRA)

Dalam buku yang berjudul *The State: Past, Present, Future* karya Bob Jessop, secara umum terdapat enam cara untuk menganalisa negara pada era kapitalistik. Adapun enam komponen negara yang dimaksud sebagai berikut:

(1) the exercise of state power (2) as an institutionally and discursively mediated condensation (a reflection and refraction) (3) of a changing balance of forces, (4) which seek to influence the forms, purposes, and content of the polity, politics, and policy (5) in specific conjunctures, marked by a variable mix of opportunities and constraints, (6) themselves linked to the wider natural and social environment (Jessop, 2016).

Menurut Bob Jessop terdapat enam komponen negara yang menjadi titik analisa teori *Strategic Relational Approach*, yaitu (1) penggunaan *state power*, (2) langkah-langkah secara institusional maupun diskursif dari negara, (3) perubahan perimbangan kekuasaan (*balance of forces*), (4) yang memengaruhi bentuk, tujuan, konten kebijakan, politik, serta pemerintahan, (5) perimbangan kekuasaan yang

terjadi dalam situasi yang ditandai oleh gabungan kesempatan dan kendala tertentu, (6) berbagai situasi tersebut berhubungan dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial yang lebih luas (Jessop, 2016).

Berdasar pada keenam komponen negara di atas, selanjutnya terdapat enam dimensi negara yang menjadi semacam objek analisa. Komponen yang dimaksud terbagi dalam dua kategori, yaitu *formal dimension* dan *substantive dimension*. Kategori *formal dimension* merujuk pada aspek-aspek institusional negara sebagai penyalur *state power*. Adapun dimensi yang dimaksud seperti, *modes of representation*, *modes of articulation*, dan *modes of intervention*. Sementara itu, *substantive dimension* merujuk pada aspek-aspek diskursif dari negara, dan berfungsi sebagai penanda dari tindakan-tindakan yang merepresentasikan *formal dimension*. Adapun dimensi yang dimaksud seperti, *Social base of the state*, *state project*, *hegemonic vision* (Jessop, 2016). Baik dimensi formal maupun dimensi substantif bakal dielaborasi lebih lanjut pada bagian-bagian selanjutnya.

Merujuk pada Nicos Poulantzas, negara merupakan representasi berbagai bentuk relasi sosial sehingga dapat dipahami bahwa negara bukan merupakan alat yang pasif atau aktor yang netral. Pengertian tadi berimplikasi pada pemahaman bahwa relasi sosial yang dibentuk oleh manusia dalam suatu negara terdapat bias yang menguntungkan beberapa orang, baik itu dipengaruhi oleh strategi dan taktik aktor, dan perubahan perimbangan kekuasaan (Jessop, 2016). Poulantzas menambahkan bahwa relasi sosial yang kontradiktif serta konflik sosial diproduksi di dalam negara. Pada titik ini penggunaan *Strategic Relational*

Approach (SRA) dipandang perlu oleh penulis guna menganalisa dampak *cartel wars* terhadap penggunaan *state power* Meksiko.

SRA berfokus pada relasi antar aktor yang berpengaruh terhadap perubahan bentuk, fungsi dan dampak dari *state power* (sebagai aktor yang tidak netral). Menurut Jessop, SRA tidak berfokus pada ‘esensi’ negara melainkan berfokus pada berbagai *ekspresi* aktor yang berusaha memengaruhi perubahan kekuatan dan kekuasaan (*balance of power*) negara baik terjadi di dalam, melalui, atau melawan sistem negara (Jessop, 2016). Perubahan perimbangan kekuatan sendiri secara spesifik dikondisikan oleh institusi, prosedur aparat negara, serta relasi sosial tertentu. Jessop juga menambahkan:

In particular, the SRA emphasizes that the biased composition of constraints and opportunities can only be understood in relation to specific strategies pursued by specific forces in order to advance specific interests over a given time horizon in terms of a specific set of other forces, each advancing its interests through specific strategies. (...) In other words, it is not the state as such that exercises power. Instead its powers (plural) are activated by changing sets of politicians and state officials located in specific parts of the state, in specific conjunctures (Jessop, 2016).

Dalam kaitannya dengan penelitian Dampak Cartel Wars terhadap Kerja sama Meksiko-AS di bidang ekonomi, SRA berguna sebagai alat analisis untuk memahami penggunaan *state power* oleh *stakeholder* Meksiko dan Amerika Serikat untuk menekan gerak-gerak kartel di Meksiko. Selain itu, SRA juga berguna sebagai alat analisis untuk memahami penggunaan *state power* melalui berbagai kondisi yang direpson baik secara diskursif maupun secara materil oleh *stakeholder* Meksiko maupun Amerika Serikat sekaligus.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai *interpretive method* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2013). Dalam Studi HI, metode penelitian ini berfokus pada analisis konteks kejadian tertentu dan berusaha untuk menemukan hubungan kausal antar variable yang diteliti. (Gonzales-Ocantor, 2020).

2. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Adapun metode pengumpulan dan Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini yakni *Process Tracing* (PT). Penggunaan PT dalam suatu penelitian bertujuan menemukan atau mengidentifikasi suatu penyebab diantara variabel serta, menemukan dampak variabel independen terhadap variabel dependen (Ocantos, 2020). Adapun kontribusi PT sebagai suatu metodologi sebagai berikut:

(a) identifying novel political and social phenomena and systematically describing them; (b) evaluating prior explanatory hypotheses, discovering new hypotheses, and assessing these new causal claims; (c) gaining insight into causal mechanisms; and (d) providing an alternative means—compared with conventional regression analysis and inference based on statistical models—of addressing challenging problems such as reciprocal causation, spuriousness, and selection bias (Collier, 2011).

Menurut Ocantos dan Gabriel, metode *process tracing* memiliki kontribusi terhadap penelitian. Adapun kontribusi yang dimaksud, yaitu (1) mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara sistematis suatu fenomena sosial, (2) mengevaluasi penjelasan dalam suatu hipotesa, menemukan hipotesa baru, dan menempatkan hipotesa tersebut ke dalam suatu klaim atas fenomena yang dianalisa, (3) mendapatkan pandangan baru terhadap mekanisme penyebab, dan (4) mengajukan maksud baru terhadap suatu fenomena yang mengandung penyebab resiprokal, bias, serta tidak terkaitnya suatu variabel dengan variabel lainnya (Ocantos, 2020).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Organized Criminal Groups

Studi mengenai *organized criminal groups* seringkali dikaitkan dengan pengertian ‘studi yang berfokus pada hubungan antara kelompok kriminal dengan negara’—biasanya disebut *crime politics* (Barnes, 2017). Menurut Nicolas Barnes, sebagian besar pengkaji *crime politics* berdasar pada asumsi bahwa *organized criminal groups*—selanjutnya disingkat menjadi OCGs—yang memanfaatkan kekuatan negara, baik secara diskursif maupun secara konkret atau materil. Menurut penelitian Stuart dan Margaret, sebagian besar OCGs melakukan aktivitasnya di bagian perbatasan negara dan bergantung kepada institusi yang mengelola perbatasan (Brown, 2020).

Bidang kajian ini mulai populer setelah dekade 2000an. Namun, tidak dapat dinafikan hubungan OCGs dan negara (pejabat atau kelompok tertentu) telah berlangsung sebelum dekade 2000an. Bahkan pada konteks Meksiko, jumlah OCGs meningkat dari 16 menjadi 64 setelah terjadinya perang kartel antara Kartel Gulf dengan kartel-kartel lainnya (Guillermo, 2020).

Dalam studi hubungan internasional, terjadi perubahan fokus kajian yang utamanya disebabkan oleh Globalisasi. Globalisasi mendorong hadirnya berbagai fokus kajian dan pendekatan baru dalam studi hubungan internasional. Salah satunya, yakni kajian mengenai *Transnational Organized Crime* (TOC)¹ yang

¹ Adapun kegiatan yang termasuk *transnational organized crime* seperti, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, penyelundupan narkoba, korupsi, perdagangan manusia, serta penyelundupan barang-barang ilegal lainnya (Iwan Sulistyono, 2022).

merupakan aktivitas dari OCGs. Dalam studi hubungan internasional, OCGs dan TOC termasuk dalam kajian studi keamanan internasional, yang tidak lagi terpaku pada tradisi keamanan tradisional (Sulistyo, 2022). Artinya, fokus analisis tidak hanya terpaku pada aktor negara, aktor non negara (seperti OCGs) turut menjadi perhatian.

TOC dan OCGs termasuk ke dalam kajian lintas negara karena pada kenyataannya terdapat berbagai bentuk tindakan kriminal seperti, tindakan kriminal yang dilakukan di dua negara sekaligus dan saling berkaitan, tindakan kriminal yang direncanakan di suatu negara dan dilakukan di negara lainnya, serta tindakan kriminal yang dilakukan oleh jaringan dari kelompok tertentu yang lokasinya melintasi batas negara (Sulistyo, 2022).

Menurut Guillermo Trejo, Teori *Organized Criminal Groups* menawarkan dua proposisi utama. Pertama, OCGs dapat melakukan aktivitas kriminal karena memiliki relasi dengan negara (pejabat dan aparat tertentu). Artinya, OCGs memanfaatkan situasi politik tertentu dan memanfaatkan penggunaan kekuasaan yang dimandatkan kepada pejabat baik pada level nasional maupun sub-nasional, serta memanfaatkan aparat penegak hukum untuk berbagai layanan seperti, informasi, sumber daya manusia, bahkan senjata (Guillermo, 2020). Secara sederhana OCGs memanfaatkan kekuasaan negara melalui relasi tertentu. Selain itu, OCGs juga bergantung pada infrastruktur yang dikelola oleh negara seperti, bandara, pelabuhan, dan perbatasan darat (Guillermo, 2020).

Proposisi kedua, kepentingan OCGs dapat berubah seiring waktu dan bergantung pada perubahan situasi dan kondisi (Guillermo, 2020). Contohnya,

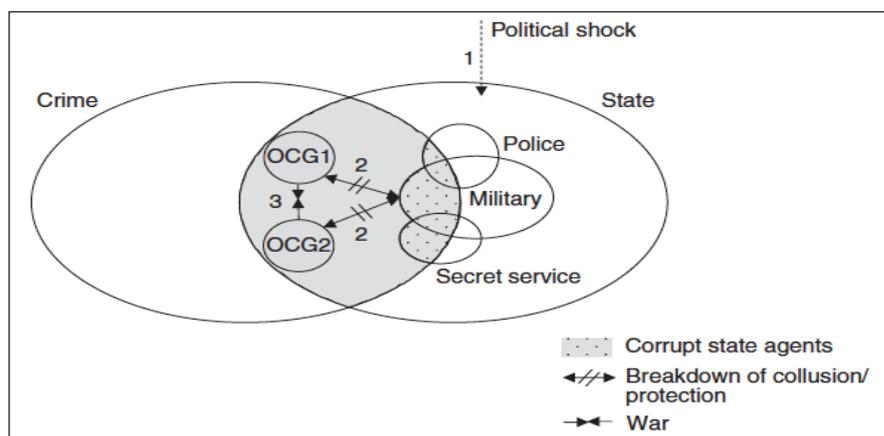
ketika rute perdagangan—merupakan aspek sentral dari aktivitas OCGs terganggu, perang kriminal (perang kartel) tidak jarang menjadi opsi. Selain itu, ketika membangun relasi dengan pejabat pada level gubernur dan wali kota (sub-nasional), OCGs berusaha mendapatkan kontrol penuh terhadap suatu wilayah guna mengamankan aktivitas kriminal yang mereka jalankan (Guillermo, 2020). Selain karena terganggu, perang kartel juga terjadi karena ekspansi pasar. Secara sederhana OCGs adalah kelompok yang pada dasarnya berorientasi pada profit, dan melakukan apapun guna mendapatkan profit (Voeten, 2020). Pada bagian selanjutnya pembahasan akan berfokus pada dua proposisi yang telah dijabarkan, secara spesifik merujuk pada konsep *Gray Zone of Criminality* dan *Drug Trafficker Organizations* (DTO).

1. Gray Zone of Criminality

Guillermo Trejo dan Sandra Ley menelusuri konsep *Gray Zone of Criminality* setelah menelusuri aktivitas kartel dan relasinya dengan pejabat dan aparat di Meksiko. Adapun pengertian *gray zone of criminality*, yaitu ekosistem yang di mana pejabat dan aparat negara serta anggota OCGs bertemu, dan ruang hidup bagi OCGs untuk tumbuh dan bereproduksi (Guillermo, 2020). Dengan adanya *gray zone of criminality*, OCGs telah memanfaatkan kekuasaan negara dan sebaliknya, pejabat dan aparat negara juga mendapat keuntungan pribadi berupa uang suap dan barang bernilai lainnya. Menurut Guillermo dan Sandra, *gray zone of criminality* hadir di Meksiko karena tiga penyebab, yaitu pemerintah dan aparat korup, perubahan sistem politik dari autokrasi menjadi demokrasi mendorong

hadirnya aktor-aktor politik baru, serta absennya reformasi dalam bidang keamanan Meksiko (Guillermo, 2020).

Sebagai ruang interaksi antara pejabat dan aparat negara dengan OCGs, aktivitas di dalam *gray zone of criminality* cukup bervariasi. Umumnya ditemukan pemaksaan, korupsi, suap, pencucian uang, pembunuhan, serta persekongkolan politik antara pejabat pemerintah dengan OCGs (Guillermo, 2020). Melihat realitas ini, *gray zone of criminality* merupakan ruang yang mampu memberikan akses kekuasaan kepada pelaku kriminal. Namun, dinamika politik juga mampu memengaruhi aktivitas yang terjadi di dalam *gray zone of criminality*. Untuk mengilustrasikan pernyataan terakhir mengenai konsep *gray zone of criminality*, berikut gambar 2 :



Gambar 2 Visualisasi *Gray Zone of Criminality*

Sumber: (Guillermo, 2020)

Kondisi ini sejalan dengan posisi OCGs yang membutuhkan kekuasaan negara untuk mengamankan aktivitas OCGs. Meskipun tidak jarang pelaku kriminal seperti OCGs tidak mengharapkan sama sekali keberadaan kekuasaan

negara karena dianggap mengganggu aktivitas mereka. Oleh karena itu, *gray zone of criminality* merupakan bentuk kompromi antara pelaku kriminal dan negara.

2. Drug Trafficker Organizations

Salah satu bentuk *organized criminal groups* adalah *drug trafficker organizations* (DTO). DTO atau kartel dapat dipahami sebagai kelompok bisnis yang menghubungkan produsen dan konsumen narkotika (Voeten, 2020). DTO sangat bergantung pada rute perdagangan—biasa disebut *plaza*—untuk mengedarkan narkotika (Guillermo, 2020). Perbedaan antara DTO dengan OCGs lainnya (grup teror, pembunuh bayaran, pemberontak) terletak pada komoditas yang diperdagangkan, yakni narkotika. Untuk menjalankan bisnis narkotika, DTO membutuhkan pasukan lapangan yang berisikan anggota kartel, anggota geng, hingga aparat kepolisian dan militer yang mampu berperang, memberikan informasi, dan memberikan pengawalan (Guillermo, 2020).

Selain memerlukan pasukan lapangan dari geng dan aparat, DTO juga memerlukan koneksi dari mereka guna menyelundupkan senjata. Bahkan tidak jarang DTO menyelundupkan apapun yang bisa diselundupkan seperti migas, buah-buahan, imigran, serta organ manusia (Cabrera, 2017). DTO juga sangat bergantung dengan rute perdagangan sebab, peran atau posisi mereka dalam industri narkotika adalah produsen atau distributor. Pada titik ini, peran pejabat pemerintah dari berbagai tingkatan dan institusi cukup penting untuk memberikan ‘akses’ kepada DTO (Guillermo, 2020).

Berbagai aktivitas tadi mendorong pemerintah Meksiko untuk menganggap DTO dan aktivitas ‘ilegal’ sebagai ancaman utama bagi keamanan nasional (Tony

Payan, 2013). Pernyataan tersebut beralasan, terlebih lagi DTO juga mampu bertransformasi terhadap dinamika sosial-politik. Dalam kondisi memperebutkan kontrol terhadap rute perdagangan, DTO bakal melancarkan perang dengan DTO (kartel) lainnya (Guillermo, 2020). Perang untuk memperebutkan rute perdagangan tidak hanya berdampak bagi masing-masing kartel, warga sipil tidak jarang menjadi korban. Pada situasi perang kartel, institusi pemerintah seperti kepolisian dan angkatan militer sering menjadi salah satu institusi yang coba digerakkan oleh DTO (Guillermo, 2020). Menurut Guillermo, DTO di Meksiko bahkan mampu bertransformasi ketika Negara Meksiko mengalami transisi dari autokrasi ke Demokrasi (*single party to multi party reform*).

Adapun transformasi yang dimaksud, yaitu DTO mampu mengubah tujuan yang melampaui distribusi narkoba. DTO juga melirik pentingnya menguasai *natural resources* dan *human resources* secara legal. Setelah ikut terlibat dalam usaha tersebut, DTO—melalui anggota tertentu—dapat memperjuangkan kepentingan mereka secara politis karena memiliki usaha yang legal. Dengan begitu, DTO atau kartel turut menjadi salah satu aktor politik terutama pada level sub-nasional Meksiko (Guillermo, 2020). Transformasi lainnya, yaitu DTO mampu memaksa atau memengaruhi koneksi mereka di pemerintahan dengan cara suap dan ancaman. Melalui transformasi ini, pengaruh politik DTO juga sangat diperhitungkan terutama di level sub-nasional (negara bagian, kota, desa) (Guillermo, 2020). Pada titik ini, peran OCGs dalam ranah sosial-politik dan ranah internasional berdasar pada dua titik tumpu utama, yaitu kemampuan membangun relasi dengan pemerintah yang terbangun dalam *gray zone of*

criminality, dan kemampuan OCGs untuk bertransformasi terhadap dinamika sosial-politik (terkhusus dalam penelitian ini merujuk pada dinamika Meksiko).

B. Strategic Relational Approach

Bob Jessop dalam bukunya *The state: Past, Present, Future* mengembangkan suatu teorisasi mengenai negara (*the state*). Pendekatan ini mengandaikan adanya suatu imajinasi, proyek, dan praktik politik yang mampu membatasi dan meregulasi sistem serta batas-batas tertentu dalam masyarakat. Bob Jessop terpengaruh oleh Nicos Poulantzas yang menganggap negara sebaiknya dianalisa sebagai relasi sosial. Selain itu, terdapat pula pengaruh Antonio Gramsci yang menganggap di dalam kehidupan masyarakat terdapat hegemoni. Kedua tokoh tadi memengaruhi terbentuknya pendekatan strategis relasional.

Pendekatan strategis relasional (*strategic relational approach/SRA*) menganggap negara sebagai relasi sosial. Dalam pengertian ini, negara dipandang sebagai kumpulan dari berbagai elemen yang bersifat materil dan diskursif yang memengaruhi penggunaan *state power*. Lebih tepatnya, SRA berusaha menjelaskan perilaku aktor politik—seperti, strategi, taktik, kepentingan, pengaruh—dalam ruang, waktu, tempat tertentu yang berpengaruh terhadap perimbangan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan dalam suatu unit politik, seperti negara (Jessop, 2016). Pendekatan ini tidak sepakat dengan pemahaman bahwa negara adalah objek yang netral (tidak mengandung bias) dan bersandar pada esensi, fungsi, bentuk tertentu. Oleh karena itu, pelacakan sebab-akibat dan historis diperlukan dalam pendekatan ini.

SRA menganggap negara sebagai struktur yang dikondisikan oleh berbagai relasi yang dilakukan agen, sementara itu tindakan agen bergantung pada kapasitas strategis dan keterlibatan mereka dalam struktur tertentu (Jessop, 2016). Pernyataan tadi merupakan konsekuensi dari pemahaman bahwa negara (dalam hal ini langkah atau tindakan) dibentuk oleh relasi sosial. Oleh karena itu, dalam penggunaan SRA perlu dipahami dimensi yang menjadi titik analisis (dalam hal ini negara). Adapun dua dimensi yang dimaksud, yaitu *formal dimensions* dan *substantive dimensions*.

Dimensi formal (*formal dimensions*) merujuk pada aspek-aspek institusional negara sebagai penyalur *state power* dan representasi politik. Adapun dimensi yang dimaksud seperti, *modes of representation*, *modes of articulation*, dan *modes of intervention*. Sementara itu, *substantive dimension* merujuk pada aspek-aspek diskursif dari negara, dan berfungsi sebagai penanda dari tindakan-tindakan yang merepresentasikan *formal dimension*. Adapun dimensi yang dimaksud seperti, *Social base of the state*, *state project*, *hegemonic vision* (Jessop, 2016). Dalam penelitian skripsi ini penulis bakal berfokus pada konsep *state project* dan *hegemonic visions* guna menganalisis berbagai peristiwa yang berkaitan dengan proses pembentukan dan dampak suatu kebijakan (atau *policymaking*) oleh agen tertentu, serta menganalisa maksud dan tujuan negara (secara hegemonik).

Baik *state project* dan *hegemonic visions* berfokus pada dampak diskursif dan materil (tindakan) dari dinamika yang terjadi pada relasi sosial yang membentuk negara (Jessop, 2016).

1. State Project

Konsep *state project* merujuk pada seperangkat kebiasaan atau kerangka kerja (*framework*) bagi pejabat negara maupun institusi negara untuk berkordinasi dan berpolitik (*policymaking and decision making*). Lebih jelasnya penulis mengutip pernyataan Jessop;

state projects aim to provide a coherent template or framework within which individual agents and organs of the state can coordinate and judiciously combine (collibrate) policy and practices, and also connect diverse policies to pursue a (more or less illusory) national interest, public good, and social welfare. In this sense, state projects are also typically articulated with various policy paradigms that frame policy orientations and decisions in specific policy fields (Jessop, 2016).

Konsep *state project* bertujuan menyediakan kerangka analisa yang berfokus pada individu dan organisasi dari negara yang mampu berkordinasi dan melipat gandakan kebijakan dan praktik, serta menghubungkan berbagai kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional, barang publik, dan kesejahteraan sosial. Dalam pengertian tersebut, *state projects* juga diartikulasikan dengan berbagai paradigma kebijakan yang membentuk citra (*framing*) kebijakan baik orientasi maupun keputusan dalam ranah kebijakan tertentu (Jessop, 2016).

Namun, negara (*state*) sebagai relasi sosial pada praktiknya rentan mengalami krisis organisasional seperti, tindakan politik yang kurang (atau tidak) representatif terhadap konstituen tertentu. Sebab, persatuan (atau kesepahaman) memainkan peran penting terhadap kepuasan konstituen terhadap representasi

politik tertentu (termasuk juga pemerintah diberbagai level pemerintahan) (Jessop, 2016).

Pengertian sempit mengenai persatuan, yaitu kemampuan pejabat negara untuk melindungi kebijakan terhadap penolakan dari berbagai pihak. Sementara itu, dalam pengertian lebih luas persatuan dapat dipahami sebagai kemampuan pejabat tertentu dalam mempertahankan tatanan politik dan kohesi sosial di suatu wilayah tertentu (Jessop, 2016). Melihat kerentanan tadi, *state project* menyarankan pemahaman bahwa tindakan resmi suatu ‘negara’ merupakan hasil kompetisi dari berbagai relasi sosial dalam ruang, waktu, dan kondisi tertentu (Jessop, 2016). Penggunaan *state project* bakal berfokus pada memungkinkan hal tidak masuk akal pada proses bersatunya kekuatan dalam negara melalui analisa terhadap struktur dan agen (Jessop, 2016). Penggunaan *hegemonic visions* bakal berfokus pada aspek yang memungkinkan hadirnya legitimasi pada basis sosial negara seperti, hak untuk mendistribusikan *common goods* (Jessop, 2016). Adapun pengertian basis sosial negara (*social bases of the state*) merujuk pada bentuk kekuatan sosial—baik individu maupun kelompok yang berpolitik—yang mendukung struktur, modus operasi, dan tujuan dari negara (Jessop, 2016).

2. Hegemonic Visions

Konsep *hegemonic visions* merujuk pada natur (watak) dan tujuan negara terhadap masyarakat dan dunia (Jessop, 2016). Dalam kata lain, konsep ini berusaha menjelaskan mengapa suatu negara bertindak pada konteks tertentu terhadap formasi sosial (kelompok atau lapisan masyarakat) tertentu. Tujuan (visi)

dan tindakan negara dalam konteks ini berhubungan dengan kondisi ekonomi, politik, imajinasi sosial (seperti nasionalisme), kelompok atau formasi sosial, pasar dunia, hubungan antar negara, serta masyarakat dunia tertentu (Jessop, 2016). Berbagai kondisi tadi juga bergantung pada bentuk dominasi, perimbangan kekuasaan, aliansi, strategi, serta berbagai peristiwa yang relevan (Jessop, 2016).

Dalam konsep *hegemonic visions* secara umum terdapat dua natur dari negara. Pertama, *one nation project* merujuk pada hegemoni yang ekspansif dan inklusif yang berbasis pada dukungan mayoritas publik yang dimobilisasi (oleh agen tertentu) melalui hak materil dan hadiah simbolis (Jessop, 2016). Pada praktiknya, *one nation project* bakal mendukung berbagai diskursus yang diusung oleh kekuatan dominan (dalam kata lain bersifat pluralistik). Kedua, *two nation project* merujuk pada hegemoni yang terbatas yang berbasis pada dukungan strategis agen tertentu untuk memobilisasi sumber daya tertentu (Jessop, 2016). Pada praktiknya, *two nation project* memerlukan kehadiran dan tekanan negara lainnya (lebih dari dua negara), serta dalam kondisi ekonomi yang stabil, memungkinkan salah satu negara memiliki akses tertentu (Jessop, 2016). Pada titik ini, kedua konsep tadi (*state project, hegemonic visions*) berfokus pada dua dinamika, yaitu sistem negara dan intervensinya terhadap ranah sosial serta, dinamika ranah sosial yang menopang (sekaligus memberi legitimasi) negara. Dalam konteks Kerjasama Meksiko-AS dalam menghadapi perang kartel narkoba, terdapat berbagai dinamika yang dilakukan oleh agen dan agensi (institusi) tertentu untuk menjadikan kartel narkoba dan aktivitasnya sebagai ancaman bagi publik. Oleh karena itu, pelacakan historis terkait dinamika kerja sama Meksiko-

AS dan dinamika hubungan kartel dengan negara bakal dibahas pada bagian selanjutnya.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian skripsi ini penulis bakal memaparkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik dinamika kartel dengan negara, dan dinamika kerja sama Meksiko dengan Amerika Serikat dalam menghadapi kartel narkoba. Hal ini dilakukan agar penulis memiliki pemahaman yang lebih luas dan dalam mengenai topik penelitian serta, penulis dapat menunjukkan aspek pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Oscar Contreras Velasco yang berjudul *Unintended consequences of state action: how the kingpin strategy transformed the structure of violence in Mexico's organized crime*. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu menunjukkan strategi kingpin berhubungan dengan fragmentasi organisasi kriminal di Meksiko, dan menunjukkan perkembangan organisasi kriminal (terutamanya kartel) sebelum strategi kingpin dalam diterapkan. Pada dasarnya penelitian ini membahas pengaruh kebijakan pemerintah Meksiko terhadap perkembangan kartel. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa kebijakan *War on Drug* yang resmi dimulai pada tahun 2007 oleh Pemerintah Amerika dan Pemerintah Meksiko memicu sejumlah kekerasan oleh kartel-kartel di Meksiko. (Velasco, 2023).

Pada tahun 2010, pasca munculnya reaksi kekerasan oleh kartel, bermunculan pula berbagai kartel baru sebagai hasil fragmentasi dari percobaan mematikan aktivitas kartel yang telah eksis (Velasco, 2023). Menurut Velasco,

munculnya kartel pendatang baru juga disebabkan oleh penyesuaian di dalam struktur organisasi kartel. Dengan motif yang sama (meraup keuntungan), sebagian kartel mendirikan organisasi baru yang berguna mengamankan *supply chain*. Dengan begitu, strategi kingpin belum mampu mematikan gerak-gerak kartel di Meksiko, justru mendorong hadirnya kartel-kartel baru.

Penelitian kedua, yaitu *Drug Wars, Organized Crime Expansion, and State Capture: Evidence from Mexico* yang dilakukan oleh Marco Alcocer. Argumen utama dari penelitian ini, yaitu intervensi pemerintah di pasar narkoba dapat mendorong kartel untuk mencari aktivitas baru dan melakukan ekspansi wilayah (dengan suap dan kekerasan) dalam rangka menemukan kesempatan bisnis baru. Untuk mendukung argumentasinya, Alcocer melakukan tinjauan sistematis terhadap 100 dokumen terkait aktivitas kartel antara tahun 2000 hingga 2012, tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas apa yang tengah dicoba oleh kartel dan kapan aktivitas tersebut dilakukan.

Adapun hasil dari penelitian ini berhasil mengidentifikasi dua aktivitas utama dari kartel, yaitu *non-capital activities* dan *capital intensive activities* (Alcocer, 2023). Menurut penelitian Alcocer, pertama-tama kartel melakukan *non capital activities* seperti, penyiksaan, pencurian, penyanderaan makanan dan perlengkapan medis. Selain itu, kartel juga melakukan *capital intensive activities* seperti, penyelundupan manusia, penebangan ilegal dan penambangan. Kedua aktivitas tadi dilakukan oleh kartel setelah adanya intervensi pemerintah terhadap setiap aktivitas mereka (Alcocer, 2023). Penelitian Alcocer menunjukkan kebiasaan kartel dalam situasi tertekan oleh intervensi pemerintah. Pemahaman

tadi berguna untuk mengetahui cara kartel di Meksiko bertahan dalam tekanan negara.

Penelitian selanjutnya, yakni *Violence In Mexico: Discussion from The Process of Accumulation of Criminal Capital* yang dikerjakan oleh Guadalupe Margarita Gonzalez. Penelitian ini menganalisa pengaruh akumulasi kapital yang dilakukan oleh kartel terhadap munculnya tindakan-tindakan kekerasan di Meksiko. Argumentasi utama dari penelitian ini, yaitu kekerasan di Meksiko berhubungan dengan proses akumulasi kapital—yang notabene sektor ekonomi berdasar pada produksi, transfer (pemindahan kekayaan), distribusi, komersialisasi dan konsumsi barang-barang ilegal (terutamanya narkoba)—sementara itu, agen dalam hal ini aktor politik dan pejabat negara Meksiko sebagai negara kapitalis yang masing-masing memiliki peranan terhadap profit di sektor tersebut. (Hernández, 2022)

Kartel melakukan kekerasan agar terjadi kerja-kerja sosial yang menghasilkan nilai lebih (*surplus value*). Dalam praktiknya, perebutan tanah dimaksudkan sebagai pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pada titik ini, pihak yang bekerja, pihak yang memberi legalitas, dan pemilik tanah penting untuk diperhatikan karena proses tadi berimplikasi pada pihak yang diuntungkan. Keseluruhan proses ini berujung pada pemasukan pajak yang dikelola oleh pejabat negara tertentu (Hernández, 2022). Menurut Guadalupe Hernandez, negara dan kartel berperan penting pada proses ini.

Proses akumulasi kapital (produksi, distribusi, penjualan, dan konsumsi) komoditas narkoba memerlukan pekerja dan sumber daya materil agar dapat

berlangsung. Lebih lanjut, kapital (modal)–yang sah secara hukum–digunakan untuk membiayai aktivitas ilegal seperti, penjualan narkoba. Dalam proses penjualan narkoba membutuhkan kekerasan agar dapat berlangsung. Pada dasarnya, proses akumulasi kapital berorientasi pada profit. Namun, aktivitas kartel sedikit berbeda dengan perusahaan konvensional.

Aktivitas ekonomi kartel membutuhkan negara (*state power, state agent, state protection*) agar dapat berjalan (Hernández, 2022). Meskipun kartel berorientasi pada profit dan cenderung beroperasi secara rahasia namun dalam praktiknya membutuhkan infrastruktur publik seperti, jalanan, pelabuhan, bandara, serta kekuatan yudisial (Hernández, 2022). Relasi kompleks ini tidak jarang menjadi ladang bisnis bagi pejabat negara. Pemahaman ini juga merupakan konsekuensi dari sifat kartel yang tidak memiliki kekuatan politik sehingga memanfaatkan akses dari negara.

Berdasar dari kesemua pemaparan tadi, kekerasan di Meksiko terjadi karena adanya proses akumulasi kapital dari komoditas narkoba. Proses tersebut melibatkan relasi sosial dan sumber daya konkret yang mampu diakses melalui negara.

Penelitian selanjutnya berjudul *The Fourth Transformation and the Trajectory of Neoliberalism in Mexico* yang dikerjakan oleh Richard Coughlin. Penelitian ini berfokus pada pengaruh perkembangan neoliberalisme terhadap perkembangan kejahatan terorganisir yang dilakukan kartel (atau organisasi kriminal). Penelitian ini berdasar pada argumen bahwa era kepemimpinan Andrés Manuel López Obrador (AMLO) memiliki pengaruh signifikan terhadap

perkembangan neoliberalisme di Meksiko. Neoliberalisme di Meksiko mengacu pada *twin insurgency*. Dalam konteks yang lebih luas, proses transformasi negara Meksiko dibentuk oleh *twin insurgency* dan kemunculan kejahatan terorganisir (Coughlin, 2023).

Menurut Richard Coughlin, terdapat tiga peristiwa yang membentuk transformasi Meksiko dan memudahkan perkembangan neoliberalisme di Meksiko. Pertama, *twin insurgency* merujuk pada pemberontakan plutokrasi yang sejak tahun 1970 berpengaruh terhadap restrukturisasi kapital pada sektor transnasional dan kemunculan (secara massif) kejahatan terorganisir. Neoliberalisme di Meksiko berkembang sejak 1970an dalam manuver politik para plutokrasi yang merespon krisis ekonomi di Meksiko. Pada masa itu, Meksiko telah melakukan ekspor ke luar negeri tanpa memperhitungkan cadangan mata uang asing yang selanjutnya mendorong terjadinya krisis internasional (Coughlin, 2023). Pada titik ini, melalui program International Monetary Fund (IMF) yakni *structural adjustment*, Meksiko mendapatkan pinjaman dengan syarat. Hadirnya modal baru melalui program *structural adjustment* berdampak pada tumbuhnya sektor-sektor informal yang memungkinkan ekspansi organisasi kriminal (Coughlin, 2023).

Kedua, kerja sama Meksiko-Amerika Serikat dalam bidang pertahanan mendorong keterkaitan ekonomi Meksiko terhadap ekonomi global. Kerja sama Meksiko-Amerika Serikat, yaitu Plan Colombia dan Merida Initiative mendorong keterkaitan ekonomi Meksiko dengan perekonomian regional (Coughlin, 2023). Melalui kerja sama dalam bidang pertahanan, iklim perekonomian Meksiko secara

gradual dibentuk agar ramah terhadap investasi, perdagangan, dan perkembangan energi. Di sisi lainnya, Amerika Serikat memiliki bidang keamanan yang sangat mumpuni sekaligus memiliki kepentingan untuk membentuk perekonomian global agar ramah terhadap investasi dan perdagangan, secara sederhana memungkinkan terjadinya ekspansi kapital (Coughlin, 2023). Ekspansi kapital hanya dapat terjadi dalam situasi dan kondisi yang kondusif.

Ketiga, pada waktu yang hampir bersamaan, organisasi kriminal di Meksiko telah mampu meningkatkan kontrol mereka terhadap wilayah, sumber daya alam, pemerintah lokal (Coughlin, 2023). Peristiwa kunci dari kejadian ini yakni, perubahan sistem kepartaian Meksiko. Runtuhnya dominasi PRI di Meksiko menandai perubahan sistem partai Meksiko dari *single party* menjadi *multi party*. Perubahan ini memungkinkan hadirnya aktor politik yang terafiliasi dengan organisasi kriminal. Ketiga peristiwa tadi merupakan bukti perkembangan neoliberalisme di Meksiko. Perkembangan neoliberalisme di Meksiko berlanjut di era kepemimpinan AMLO yang juga melakukan sejumlah transformasi (Coughlin, 2023).

AMLO menganggap perekonomian Meksiko tergolong lambat dan terganggu oleh pertumbuhan organisasi kriminal (Coughlin, 2023). Oleh karena itu, kepemimpinan AMLO menginginkan kestabilan wilayah di Meksiko. Hal ini juga tercermin dalam Bicentennial Framework yang diteken pada tahun 2021. Menurut Coughlin, transformasi keempat (dalam hal ini kepemimpinan AMLO) tidak lebih dari trajektori neoliberalisme (Coughlin, 2023). Sebab, Penerapan sirkuit baru akumulasi modal ini telah mengakibatkan gangguan besar terhadap

penghidupan sebelumnya, namun juga kebangkitan neoliberalisme dari bawah yang telah memperluas kejahatan terorganisir dan memungkinkan orang baru ke dalamnya (Coughlin, 2023).

Penelitian selanjutnya berjudul *United States of America Policies in Managing Treats of Drugs from Mexico (2017-2019)* yang dikerjakan oleh Hendra Maujana Saragih, Muhammad Zulham, dan Laras Deaziska. Penelitian ini berfokus pada dinamika kerja sama Amerika Serikat dan Meksiko dalam menghadapi perdagangan narkoba pada era kepemimpinan Presiden Donald Trump. Penelitian ini berangkat dari perspektif kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Adapun argumentasi utama dari penelitian ini, yaitu kebijakan Amerika Serikat terhadap ancaman narkoba dan imigran pada era Donald Trump menimbulkan berbagai dampak seperti, peningkatan jumlah narkoba di beberapa negara bagian Amerika Serikat.

Kebijakan Amerika Serikat (2017-2019) menargetkan aspek-aspek tertentu. Secara garis besar, kebijakan ini berfokus pada aspek penguatan sistem imigrasi dan pemberian dana untuk penegakan hukum. Dalam praktiknya, penguatan sistem imigrasi ditempuh dengan cara antara lain; mengirim *national guard troops* untuk membantu patroli di perbatasan, memberi tugas tambahan kepada MARAD, serta mengirim tambahan pasukan di wilayah tertentu seperti, karibia dan pasifik bagian timur. Sementara itu, pemberian bantuan ditempuh dalam kerangka kerja sama Merida Initiative. Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan dana sebesar 1.6 milyar (USD) kepada Pemerintah Meksiko untuk penegakan hukum di Meksiko. Selain itu, terdapat pula bentuk bantuan lainnya seperti, perangkat *x-ray*,

anjing pelacak, lima buah helikopter, serta latihan khusus bagi 4000 pasukan meksiko.

Menurut penelitian ini, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam kurun waktu 2017-2019 belum efisien dalam menganggulangi perdagangan narkoba yang dilakukan kartel. Sebab, penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat justru meningkat dari tahun 1991. Selain itu, dalam kurun waktu tersebut korupsi dan suap di Meksiko masih tergolong sering dilakukan. Belum lagi, dampak dari kebijakan sistem imigrasi pada kurun waktu 2017-2019 justru meningkatkan total imigran ilegal meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sekitar 100.000 orang. Oleh karena itu, kebijakan Amerika Serikat pada kurun waktu 2017-2019 belum efektif dalam meghadapi perdagangan narkoba kartel.